



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.974.005.326.199,- yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.75.245.803.918,- yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.45.167.054.032,- yang terdiri atas :

- a. Pajak Hotel sebesar Rp.400.000.000,-.
- b. Pajak Restoran sebesar Rp.1.000.000.000,-.
- c. Pajak Hiburan sebesar Rp.17.850.000,-.
- d. Pajak Reklame sebesar Rp.1.000.000.000,-.
- e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.17.800.000.000,-.
- f. Pajak Parkir sebesar Rp.52.500.000,-.

- g. Pajak Air Tanah sebesar Rp.2.500.000.000,-.
  - h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.750.000.000,-.
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.150.000.000,-.
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.6.366.511.406,-.
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.15.130.192.626,-.
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.002.092.200,- yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.2.880.492.200,-.
  - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.721.600.000,-.
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.400.000.000,-.
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.562.500.000,-. Yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.3.562.500.000,-.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.22.514.157.686,- yang terdiri atas :
- a. Jasa Giro sebesar Rp.3.500.000.000,-.
  - b. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.3.014.157.686,-.
  - c. Pendapatan BLUD sebesar Rp.16.000.000.000,-.

#### Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.890.986.846.281,- yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.830.829.693.000,- yang terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan Rp.771.626.519.000,- dan
  - b. Dana Desa Rp.59.203.174.000,-.
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.60.157.153.281,- yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.10.701.123.405,-.
  - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.9.271.873.358,-.
  - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.20.508.070.738,-.
  - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp.1.946.875.239,-.

e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp.17.729.210.541,-.

#### Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.772.676.000,- yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.7.772.676.000,-.

#### Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.040.364.086.756,- yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 10

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.746.750.691.708,- yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja Bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.409.838.829.060,- yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.253.649.487.546,-.
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.78.219.384.228,-.
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp.50.386.789.165,-.
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp.16.536.624.247,-.
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.185.716.374,-.
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.617.728.000,-.
- g. Belanja Pegawai BOS sebesar Rp.10.243.099.500,-.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.289.185.937.448,- yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang sebesar Rp.72.954.717.119,-.
- b. Belanja Jasa sebesar Rp.124.413.268.237,-.
- c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.19.381.725.298,-.
- d. Belana Perjalanan Dinas sebesar Rp.28.745.606.028,-.
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.1.360.620.000,-.
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.18.794.953.812,-.
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.7.535.046.954,-.

- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.16.000.000.000,-.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.780.925.200,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.27.279.795.200,-.
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.6.212.880.000,-.
  - c. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp.8.226.530.000,-.
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.517.020.000,-.
  - e. Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp.3.544.700.000,-.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.945.000.000,- yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.165.977.307.556,- yang terdiri atas :
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.885.540.884,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.158.247.163,-.
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.4.077.033.250,-.
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.5.008.542,-.
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.69.302.234,-.
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.4.538.569.117,-.
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp.686.314.107,-.
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.1.863.606.605,-.
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.764.652.674,-.
  - i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.3.355.912.167,-.
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp.1.665.000.000,-
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.90.981.837,-.
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp.3.610.913.188,-.
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.955.114.947,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp.19.100.114.947,-.
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp.2.855.000.000,-.

- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.115.967.784.680,- yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp.110.198.686.210,-.
  - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp.4.962.000.000,-.
  - c. Belanja Modal Instalasi Rp.7.098.470,-.
  - d. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp.800.000.000,-.
  
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.165.299.163,- yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp.109.780.895,-.
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp.876.994.76,-.
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp.6.178.523.500,-.
  
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.567.882,- yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

#### Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.047.948.369,- yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.124.588.139.123,- yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.916.914.623,-, yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp.4.516.705.403,-.
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.400.209.220,-.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.119.671.224.500,- yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.66.358.760.557,- yang terdiri atas :
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.66.358.760.557,- yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;



- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.66.358.760.557,-

#### Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-

#### Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.66.358.760.557,-.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.66.358.760.557,-.

#### Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YAKUB ARIFIN, SH, MH.  
NIP. 19810112 201101 1 003.



**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>75.245.803.918,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	45.167.054.032,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	400.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	400.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	400.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	100.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	100.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	900.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	900.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	17.850.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	17.850.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	17.850.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	17.800.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	16.800.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	16.800.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	52.500.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	52.500.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	52.500.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	750.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.366.511.406,00
4.1.01.15.01	PBBP2	6.366.511.406,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.366.511.406,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.130.192.626,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.130.192.626,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.130.192.626,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.002.092.200,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.880.492.200,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	276.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	276.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.099.747.200,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.099.747.200,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	55.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	55.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	936.360.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	267.840.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	668.520.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	114.485.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	114.485.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	98.900.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	98.900.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	721.600.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	721.600.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	20.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	701.600.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.562.500.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.562.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.562.500.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.562.500.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.514.157.686,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	3.014.157.686,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	219.693.650,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	219.693.650,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	227.984.574,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	227.984.574,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	2.566.479.462,00
4.1.04.15.16.0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.566.479.462,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	16.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	16.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	16.000.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>890.986.846.281,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	830.829.693.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	771.626.519.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	82.559.044.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	38.412.243.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	8.108.694.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	272.084.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	18.232.551.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	73.741.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.664.442.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	834.025.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	13.817.422.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	522.121.461.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	405.912.050.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	27.494.154.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	47.609.096.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	27.232.677.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	13.473.484.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.830.803.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	374.616.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.759.876.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.008.551.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	109.997.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	11.100.000.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.115.499.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.342.193.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.738.126.000,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	93.512.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.188.433.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	115.115.211.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	46.976.670.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.916.495.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.111.772.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.622.050.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	747.880.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	383.598.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.129.703.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.934.206.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.772.837.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	59.203.174.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	59.203.174.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	59.203.174.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.157.153.281,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	60.157.153.281,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.157.153.281,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.701.123.405,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.271.873.358,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.508.070.738,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.946.875.239,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.729.210.541,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.772.676.000,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.772.676.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.772.676.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.772.676.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.772.676.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>974.005.326.199,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>746.750.691.708,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	409.838.829.060,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	253.649.487.546,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	182.606.074.215,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	147.296.485.832,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	35.309.588.383,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.013.308.013,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.433.117.512,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.580.190.501,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.867.126.990,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.840.558.990,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	26.568.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.459.838.240,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.017.774.790,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.442.063.450,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.251.914.863,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.083.354.863,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	168.560.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.653.489.843,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.965.330.923,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.688.158.920,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	737.939.781,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	708.819.714,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	29.120.067,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.771.967,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.540.073,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.231.894,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.008.742.488,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.261.736.619,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	747.005.869,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	975.598.998,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	799.730.534,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	175.868.464,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.061.682.148,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	658.357.138,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	403.325.010,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	78.219.384.228,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	73.100.884.228,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	68.884.823.978,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.216.060.250,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	980.000.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	980.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.138.500.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.138.500.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.386.789.165,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	47.916.495.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	47.916.495.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.111.772.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.111.772.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	237.790.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	237.790.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.054.880.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	136.920.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	917.960.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	65.852.165,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	65.852.165,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.536.624.247,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	844.603.200,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	844.603.200,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	118.244.448,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	118.244.448,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	84.460.320,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	84.460.320,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.224.674.640,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.224.674.640,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	142.264.836,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	142.264.836,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	52.486.056,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	52.486.056,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.762.800.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.762.800.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.190.700.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.190.700.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	504.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	504.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.492.794.747,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	146.794.564,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.500.045,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	13.500.138,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.328.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.615.680.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.615.680.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	361.972.800,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	361.972.800,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	185.716.374,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.939.999,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.939.999,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.971.600,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.971.600,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.469.536,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.469.536,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.052.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.052.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.057.279,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.057.279,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.600,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.600,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.734.640,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.734.640,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.680,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.680,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	617.728.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	217.728.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	217.728.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	10.243.099.500,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	10.243.099.500,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	10.243.099.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.185.937.448,00
5.1.02.01	Belanja Barang	72.954.717.119,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.317.819.837,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	216.221.422,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	29.334.120,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	556.299.656,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	71.713.200,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	154.056.468,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	25.124.820,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	39.840.675,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	51.971.010,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.597.358,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.051.227.456,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	496.309.118,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.812.476.416,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.039.466.283,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.594.409.890,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	184.027.520,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.210.870.920,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.143.027.244,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.157.941.790,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	38.737.130,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	36.663.231,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	637.407.873,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	142.377.860,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.557.138.646,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.218.559,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.417.787.181,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.240.603.418,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.797.435.343,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	152.400.152,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.117.121.312,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.294.947.445,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	138.420.910,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	402.787.849,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	142.231.250,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	132.330.715,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	303.551.211,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	20.510.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	7.531.190,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	690.410.358,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	62.150.838,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	86.142.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	64.093.750,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	64.093.750,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	572.803.532,00
5.1.02.01.04.0625	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	536.377.772,00
5.1.02.01.04.0737	Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	36.425.760,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	124.413.268.237,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	95.677.460.951,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.842.331.525,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	957.731.292,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	469.695.300,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	104.896.873,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	105.300.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	514.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	14.348.040.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.233.718.212,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	134.400.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	533.700.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.373.200.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	433.200.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	27.200.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	691.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	69.036.387,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.539.600.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.316.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.818.653.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.167.359.017,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.911.850.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.037.700.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.150.000.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	594.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	448.800.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	81.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	42.600.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	702.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	900.613.097,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	196.340.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	873.154.055,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	39.600.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	369.920.666,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.080.435.235,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	525.753.129,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.271.972.764,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	4.656.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	424.040.545,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	115.763.854,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.060.815.031,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.258.922.496,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	8.693.697.600,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	674.587.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.320.000.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	897.600.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	216.007.735,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.258.414.968,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	12.408.550,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	76.912.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	80.118.860,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	104.099.100,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	547.863.136,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	19.920.341,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	850.040.679,00
5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	9.060.360,00
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	179.682.400,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	113.105.892,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	41.020.000,00
5.1.02.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply	10.400.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	95.986.800,00
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	117.796.350,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.927.476.259,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	307.342.350,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	174.000.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	12.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	607.747.172,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.332.600,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	101.782.298,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	659.271.839,00
5.1.02.02.05.0046	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	60.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.409.400,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	6.409.400,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.184.914.578,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.483.821.900,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	316.350.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	59.533.358,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	3.300.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.631.500.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	359.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	1.000.000,00
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	33.709.320,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	654.445.650,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	71.756.650,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	581.689.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	600.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	600.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.043.331.400,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.491.218.400,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	552.113.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.381.725.298,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.290.415.634,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	135.579.038,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	114.536.460,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	253.444.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	169.397.256,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	114.741.144,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	167.600.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.067.640.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	482.430.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.002.700.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	940.117.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.240.000,00
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	38.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	328.180.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.595.930,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	17.074.576,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	830.554.910,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	422.150.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	62.616.000,00
5.1.02.03.02.0442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya	27.319.320,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.758.502.914,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.905.919.938,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	602.582.976,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	770.000.000,00
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	180.000.000,00
5.1.02.03.03.0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	300.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.245.306.750,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.000.000.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	1.150.000.000,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	150.000.000,00
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	400.000.000,00
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	120.000.000,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	112.061.000,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	170.745.750,00
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	42.500.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	87.500.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	87.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.745.606.028,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.745.606.028,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.715.534.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.352.839.028,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	160.804.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	516.429.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.360.620.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.360.620.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	742.250.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	618.370.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.794.953.812,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.794.953.812,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.794.953.812,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.535.046.954,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.535.046.954,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.535.046.954,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.000.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.000.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.780.925.200,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	27.279.795.200,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	27.279.795.200,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	27.279.795.200,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.212.880.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.767.880.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.920.000.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	747.880.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	220.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	220.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.225.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.225.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	8.226.530.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.086.530.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.086.530.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	140.000.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	140.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.517.020.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.517.020.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.517.020.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	3.544.700.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.544.700.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.544.700.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	945.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	945.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	945.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	945.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>165.977.307.556,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.885.540.884,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	158.247.163,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	151.622.228,00
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	151.622.228,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6.624.935,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	6.624.935,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.077.033.250,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.077.033.250,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.760.763.485,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	80.019.765,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.236.250.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.008.542,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.008.542,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	5.008.542,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	69.302.234,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	69.302.234,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	69.302.234,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.538.569.117,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	338.872.993,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	106.774.575,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	232.098.418,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.973.839.318,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.131.320.728,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	7.641.580,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	497.400.073,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	11.573.044,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	222.517.323,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	103.386.570,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	225.856.806,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	20.820.750,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	99.643.806,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.959.593,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	16.490.628,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	85.942.029,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	686.314.107,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	686.314.107,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	69.039.604,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	593.610.675,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	23.663.828,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.863.606.605,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.863.606.605,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	265.799.722,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	409.997.000,00
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	944.201.641,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	93.947.273,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	149.660.969,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	764.652.674,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	122.342.790,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	28.842.790,00
5.2.02.08.01.0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	93.500.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	631.837.478,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	170.775.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	461.062.478,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10.472.406,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	10.472.406,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.355.912.167,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.351.798.933,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.351.798.933,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.004.113.234,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	67.170.250,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	436.942.984,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.500.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.665.000.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	1.665.000.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	1.265.000.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	400.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	90.981.837,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	90.981.837,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	72.661.810,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	2.134.325,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	16.185.702,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.610.913.188,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.610.913.188,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.610.913.188,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.955.114.947,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	19.100.114.947,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	19.000.114.947,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.021.288.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	274.100.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	300.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.992.782.947,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	60.000.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	435.968.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	300.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.500.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.915.976.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	100.000.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	100.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.855.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.855.000.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	5.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.850.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.967.784.680,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	110.198.686.210,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	104.518.686.210,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	102.303.686.210,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	420.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.795.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.680.000.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	5.680.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.962.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.462.000.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.462.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	250.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	250.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.250.000.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.250.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	7.098.470,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	7.098.470,00
5.2.04.03.06.0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	7.098.470,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	800.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	800.000.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	800.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.165.299.163,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	109.780.895,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	109.780.895,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	4.780.895,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	105.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	876.994.768,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	149.902.458,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	149.902.458,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	727.092.310,00
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	727.092.310,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.178.523.500,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.178.523.500,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.178.523.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.567.882,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	3.567.882,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.567.882,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	3.567.882,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.047.948.369,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.047.948.369,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.047.948.369,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.047.948.369,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.047.948.369,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>124.588.139.123,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.916.914.623,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.516.705.403,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.516.705.403,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.516.705.403,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	400.209.220,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	400.209.220,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	400.209.220,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	119.671.224.500,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	119.671.224.500,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	119.671.224.500,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	59.203.174.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	60.468.050.500,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.040.364.086.756,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-66.358.760.557,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>66.358.760.557,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.358.760.557,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	66.358.760.557,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	66.358.760.557,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	66.358.760.557,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>66.358.760.557,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Labuhanbatu Selatan, 29 Desember 2023

Bupati

ttd

H. EDIMIN